

---

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN DAMPAK COVID 19 MELALUI BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) (Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo)

**Marten Nusi, Sandi Prahara, Darmawaty Abd Razak**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Ichsan Gorontalo, Indonesia  
Martennusi19@gmail.com, sandyprahara329@gmail.com, amarazak67@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Borontalo. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan pendekatan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah melalui pendekatan analisis jalur yang mengedepankan aspek narasi deskriptif. Adapun hasil penelitian menunjukkan program tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Implementasi program bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Tuladenggi telah disosialisasikan oleh pemerintah Desa melalui berbagai kegiatan yang mengumpulkan masyarakat, maupun pelibatan unsur aparat pemerintah pada tingkat Dusun. Program bantuan langsung tunai (BLT) model pendanaannya adalah melalui kebijakan anggaran dana Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa dengan melibatkan masyarakat didalamnya. Untuk mendukung tercapainya tujuan program, maka komitmen kerja pemerintah Desa telah ditunjukkan dengan adanya sinergitas dan konsistensi sejak tahapan pengusulan pendataan sampai pada dana diterima langsung oleh masyarakat. Sebagai saran dari peneliti terhadap pemerintah Desa Tuladenggi dalam melaksanakan kebijakan program bantuan langsung tunai (BLT) adalah Perlu dimaksimalkan lagi dengan berbagai cara untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan program atau kebijakan yang diambil dan dilaksanakan, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam mendukung dan menyebarkan informasi penting akan setiap kebijakan yang diambil.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Bantuan Langsung Tunai, Kebijakan Penanggulangan

### PENDAHULUAN

Pembangunan yang berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang diarahkan pada pencapaian target pembangunan seutuhnya dengan melihat latar kebijakan pembangunan sebelumnya sebagai pondasi untuk keberlanjutan satu pembangunan. Konsep pembangunan selama ini diarahkan pada beberapa pendekatan yang menjadi fokus utama, diantaranya adalah pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana, hingga pada pembangunan manusia. Konsep pembangunan manusia pada khususnya menitik beratkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui beberapa program atau kebijakan pemberdayaan dengan sasaran masyarakat miskin atau rentan miskin yang dalam ukuran keseharian dikategorisasi sebagai masyarakat yang tidak mampu.

Konteks kemiskinan telah menjadi permasalahan global dan krusial sejak dulu. Berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan telah dilakukan melalui kebijakan pembangunan manusia dengan satu tujuan, yaitu adanya perubahan pola hidup masyarakat dari sisi kualitas hidupnya dalam kehidupan sehari-hari. Semua Negara diproteksi memiliki permasalahan yang sama dalam konteks kemiskinan sekalipun dengan tingkat permasalahan yang berbeda dan pola penanganan yang berbeda pula.

Ditengah ketepurukan ekonomi akibat pandemik Covid 19 pemerintah mengambil kebijakan untuk pencegahan dan penanganan dampak dari pandemic Covid melalui pemberian atau stimulus ekonomi bagi masyarakat miskin dengan kategori tertentu sebagai upaya proteksi dini atas dampak pandemic covid di Indonesia.

Program bantuan langsung tunai (BLT) adalah satu dari program bantuan pemerintah bagi warga terdampak Covid 19. Kebijakan BLT melalui dana desa tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dengan tujuan meringankan masyarakat miskin melalui penyaluran yang cepat, tepat dan memenuhi ketentuan pelaksanaannya.<sup>1</sup>

Hasanah dan Putri dalam temuan penelitiannya menjelaskan bahwa orientasi kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Pelaksanaan kebijakan program BLT dalam beberapa temuan hasil penelian juga menunjukkan bahwa pada tataran pelaksanaan kebijakan, terdapat permasalahan-permasalahan umum yang terjadi hampir pada semua Desa seperti halnya sistem pendataan dan kesiapan aparat pemerintah Desa dalam melaksanakan program BLT telah menjadi bagian dari permasalahan yang harus dicarikan solusi tepat.<sup>2</sup>

Hal yang sama juga terjadi pada pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, diantara permasalahan tersebut adalah data penerima manfaat yang tidak tepat sasaran yang disebabkan oleh kurang maksimalnya penyelerasan data miskin antara kementerian sosial, pemerintah Daerah dan pendataan yang dilakukan oleh pemerintah Desa, adanya sistem kolusi diantara petugas pendataan dengan masyarakat, kurangnya komunikasi dalam bentuk pemahaman yang konfrehensif akan program BLT, serta model penyaluran program yang kurang maksimal terjadi dilapangan. Permasalahan-permasalahan tersebut juga relevan dengan apa yang menjadi penekanan Edward III tentang pentingnya komunikasi yang efektif yang berdampak pada pemahaman yang baik bagi aktor pelaksana dan penerima program, ketersediaan sarana dan prasarana sebagai sumber daya pendukung, serta sikap aktor pelaksana menjadi penting untuk diperhatikan dalam pencapaian tujuan kebijakan.<sup>3</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan, mengungkap dan menganalisis fakta-fakta yang penuh makna, dimana temuan yang diperoleh dilapangan melalui metode pengumpulan data yang ditentukan. Proses pengumpulan data dilakukan oleh peneliti melalui teknik pengumpulan data, yaitu : observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>4</sup> Untuk teknik observasi dilakukan melalui pengamatan langsung dilapangan pada tahap proses pelaksanaan program BLT di Desa Tuladenggi, sedangkan untuk teknik wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang dianggap mengetahui secara pelaksanaan program BLT di Desa Tuladenggi atau dengan teknik *purposive sampling*.<sup>5</sup>

Konstruk penelitian ini memfokuskan pada model implementasi kebijakan model Edward III tentang indikator pengukuran model implementasi kebijakan, yaitu : Sosialisasi, yang akan menelaah, mengkaji informasi tersampaikan pada aktor pelaksana dan penerima kebijakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid 19, ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid 19, serta komitmen aktor pelaksana, komitmen aktor pelaksana dimaksud untuk mempertegas sikap aktor pelaksana dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT).<sup>6</sup>

Upaya untuk menggunakan analisis data dengan melihat beberapa teori tentang metode analisis yang ada, maka penulis menggunakan teknis analisis data sebagaimana yang pendapat Miles dan Huberman yang membagi empat hal penting dalam analisis data kualitatif, yaitu :

a) Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data adalah langkah awal yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian dilapangan. Langkah ini sebagai pembuka dari proses penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan seluruh data-data yang dianggap relevan dan bisa dijadikan sebagai bahan kajian pada apa yang sedang diteliti.

b) Reduksi Data

Setelah melakukan pengumpulan data, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pemetaan data. Pemetaan data atau disebut dengan Reduksi data adalah langkah analisis data hasil pengumpulan yang bertujuan untuk melakukan klasifikasi data-data yang dianggap penting dan relevan dengan apa yang akan dianalisis, mengingat banyaknya data-data yang diperoleh dilapangan. Sehingga memudahkan peneliti saat melakukan penyusunan hasil penelitian.

c) Penyajian Data

Penyajian data adalah langkah selanjutnya setelah dilakukannya reduksi data oleh peneliti. Hal ini sebagai proses uraian hasil penelitian setelah peneliti menganalisis data-data yang telah diperoleh dan direduksi dengan baik oleh peneliti yang kemudian disajikan kedalam bentuk laporan.

d) Verifikasi

Langkah terakhir yang dilakukan oleh peneliti dalam analisis data kualitatif sebagaimana yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017), adalah upaya penarikan kesimpulan atau verifikasi tentang temuan penelitian.<sup>7</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang peneliti lakukan berkaitan dengan kebijakan program bantuan langsung tunai sebagai dampak penanganan dari pandemic covid 19 di Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo melalui metode pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi secara langsung dilapangan, serta mempelajari beberapa dokumentasi yang peneliti peroleh pada lokus penelitian, maka terdapat beberapa temuan hasil penelitian yang dapat disajikan sesuai dengan fokus kajian dalam penelitian ini, yaitu:

### A. Sosialisasi Program

Faktor komunikasi dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah bagian pertama dan sebagai indikator penentu awal dari pealaksanaan satu kebijakan. Kebijakan Program bantuan langsung tunai sebagai bagian dari penanganan dampak covid 19 adalah bagian integral dari kebijakan pemerintah pusat yang dianggarkan melalui APBN yang kemudian didistribusikan melalui pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan direalisasikan secara langsung oleh pemerintah Desa dengan berpedoman pada data penerima keluarga miskin yang telah tercatat sebelumnya.

Berangkat dari temuan awal oleh peneliti tentang adanya masyarakat yang tidak menerima program bantuan langsung tunai di Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, maka kemudian peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan beberapa informan. Seperti halnya kepala Desa Tuladenggi yang menyebutkan tentang adanya komitmen lembaga pemerintah Desa Tuladenggi dalam melaksanakan setiap kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, salah satunya BLT yang terus disosialisasikan kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut sekretaris Desa Tuladenggi juga menyebutkan hal yang sama pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Penjelasan yang sama juga ditemukan melalui hasil wawancara bersama kepala kesejahteraan sosial dan juga kepala dusun III Desa Tuladenggi.

Berdasarkan uraian penjelasan dari informan-informan tersebut yang secara normatif menjelaskan bahwa adanya upaya konkrit yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tuladenggi, maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi program bantuan langsung tunai (BLT) pada masyarakat Desa Tuladenggi telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa, baik oleh Kepala Desa, maupun oleh aparat Desa melalui berbagai macam kegiatan serimonial lainnya dengan tujuan memberikan informasi kepada masyarakat tentang konsep dari kebijakan BLT tersebut. Upaya sosialisasi yang dilakukan dalam berbagai macam bentuk kegiatan tersebut juga menjadi ajang pembuktian mengenai komitmen pemerintah Desa Tuladenggi guna menciptakan kepercayaan masyarakat akan pelaksanaan program-program kesejahteraan masyarakat Desa. Permasalahan terkait dengan adanya keluhan masyarakat yang merasa tidak mendapatkan informasi atau tidak masuk sebagai penerima program bantuan langsung tunai (BLT) juga menjadi bagian dari temuan peneliti yang disampaikan oleh masyarakat. Prinsip dasar pelaksanaan program tersebut berdasarkan temuan wawancara dan observasi memberikan gambaran substansial bahwa pelaksanaan sosialisasi program bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Tuladenggi sebagai bagian dari penanganan dampak Covid 19 telah berjalan sesuai dengan tahapan, adanya pemasalahan yang muncul dilapangan adalah bagian lain dari dinamika penerapan kebijakan, namun perlu diberikan koreksi, serta perbaikan yang dilakukan secara masif dengan pelibatan seluruh komponen perangkat Desa, serta pelibatan organ lain yang ada di Desa.

Implementasi program bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Tuladenggi telah disosialisasikan oleh pemerintah Desa melalui berbagai kegiatan yang mengumpulkan masyarakat, maupun pelibatan unsur aparat pemerintah pada tingkat Dusun. Pelibatan unsur pemerintah secara keseluruhan adalah langkah tepat untuk mendukung distribusi informasi kepada masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan. Problem yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan adalah ketika kurangnya pemahaman dari aktor pelaksana dan khususnya sasaran kebijakan terhadap satu konsep kebijakan yang diambil

Kebijakan tidak hanya dilihat pada tataran rencana saja, namun perlu disosialisasikan dengan baik kepada semua yang berkepentingan, sehingga dapat memberika satu kesepahaman dalam pelaksanaannya. Solichin A. Wahab: menjelaskan bahwa langkah pembentukan pemahaman akan konsep kebijakan menjadi sangat urgen, mengingat akan terjadi kesemrautan dalam bahkan sampai pada tarap tidak diterimanya kebijakan tersebut oleh sasaran kebijakan.<sup>8</sup>

## **B. Ketersediaan Anggaran.**

Salah satu dimensi yang dapat mendukung tercapainya tujuan kebijakan adalah tersedianya sumber daya berupa anggaran sebagai pembiayaan dari pelaksanaan suatu kebijakan. Dimasukannya kebijakan anggaran sebagai dimensi pelaksanaan kebijakan disebabkan oleh karena setiap kebijakan tanpa adanya anggaran dalam pembiayaannya, maka sudah dapat dipastikan kebijakan tersebut tidak akan terlaksana. Grindle: menjelaskan bahwa faktor *Resources Committed* atau dukungan sumber daya termaksud didalamnya dukungan anggaran adalah bagian penting yang yang dapat memperlancar kebijakan yang akan dilaksnakan, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan.<sup>9</sup>

Hal tersebut juga menjadi dimensi penting dari implementasi program bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. Untuk mendapatkan informasi sebagai kebutuhan data penelitian, maka peneliti melakukan wawancara bersama beberapa informan tentang ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan program keluarga bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Tuladenggi. Beberapa informan yang diwawancarai oleh peneliti terkait ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat Desa Tuladenggi menjelaskan bahwa dukungan dana penanggulangan dampak covid sejak awal telah disediakan oleh pemerintah Desa Tuladenggi melalui dana Desa yang ada setiap tahun. Hal tersebut sebagaimana menjadi penjelasan dari

kepala Desa Tuladenggi, dimana untuk anggaran pelaksanaan bantuan langsung tunai (BLT) selalu berkesesuaian dengan arah kebijakan pemerintah daerah kabupaten Gorontalo tentang penggunaan dana Desa sebagai penanggulangan dampak covid 19 bagi masyarakat melalui program BLT. Program bantuan langsung tunai (BLT) ini adalah program pemerintah pusat yang dibiayai oleh dana Desa setiap tahunnya, khusus untuk BLT dana Desa sebagai bagian dari penanggulangan dampak covid 19, program ini diorientasikan untuk menjaga kestabilan ekonomi masyarakat miskin akibat dampak nyata dari Covid 19.

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara bersama para informan, maka dapat disimpulkan bahwa ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT) diberikan berdasarkan presentasi 40% yang diambil dari dana Desa. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program BLT melalui dana Desa tidak menjadi kendala berarti bagi pemerintah Desa, karena dana tersebut diberikan kepada masyarakat penerima yang berjumlah 125 jiwa. Besaran 300.000 rupiah untuk setiap penerima diterima untuk setiap tiga bulan berjalan. Artinya bahwa masyarakat diberikan bantuan langsung tunai (BLT) secara periodik atau triwulan berjalan. Hal ini tentu menjadi harapan masyarakat untuk diperbaiki penyalurannya dengan masa setiap bulan sebagaimana hak yang seharusnya diterima.

Konsep kebijakan sejak awal telah menetapkan kebijakan anggaran yang dapat mendukung tercapainya tujuan kebijakan. Program bantuan langsung tunai (BLT) model pendanaannya adalah melalui kebijakan anggaran dana Desa yang besaran persentasinya adalah 40% dari dana Desa yang dianggarkan setiap tahunnya. Penganggaran dengan sistem presentasi 40% dana Desa seyogyanya adalah bagian dari pemangkasan anggaran bagi kegiatan pembangunan lainnya. Sehingga terlihat bahwa banyak sektor-sektor kegiatan lainnya mengalami pengurangan anggaran yang cukup besar dan dapat dikatakan berdampak pada lambatnya pembangunan infrastruktur di Desa yang juga penting untuk dilakukan. Faktor sumber daya berupa anggaran telah disepakati menjadi satu faktor pendukung penting untuk terwujudnya tujuan kebijakan.

### **C. Komitmen Aktor Pelaksana Program**

Salah satu dimensi yang juga menjadi penentu keberhasilan suatu kebijakan yang dilaksanakan adalah adanya komitmen aktor pelaksana program. Komitmen aktor pelaksana dimaksudkan untuk memastikan adanya konsistensi para pelaksana program mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahapan akhir pelaksanaan program. Dalam konteks ini menurut teori Edward III bahwa tidak hanya dibutuhkan kecakapan atau kemampuan berupa pengetahuan aktor pelaksana, namun lebih dari itu adalah adanya komitmen pelaksana dalam menjalankan program tersebut.<sup>10</sup> Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa komitmen kerja pemerintah Desa dalam melaksanakan program bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Tuladenggi selalu terjaga dengan baik. Arah dan bentuk pengawasan dan pelaksanaan program di lapangan selalu dilaksanakan dengan baik. Sebagai pelaksana langsung, komitmen itu ditunjukkan dengan memastikan masyarakat menerima bantuan tersebut dengan memberikan informasi bagi mereka penerima, sampai pada waktu dicairkannya dana tersebut.

Rumusan Van Matter dan Van Horn tentang komitmen aktor pelaksana juga menjelaskan bagaimana kedudukan dari sub variabel disposisi tersebut, yaitu mengistilahkan dengan *The Disposition or response of implementers* (Disposisi atau response dari para pelaksana). Komitmen Sikap penerimaan dan penolakan agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya suatu kinerja implementasi kebijakan publik. Sikap pelaksana ini berkaitan dengan seberapa demokratis, antusias dan responsif terhadap kelompok sasaran dan lingkungan.<sup>11</sup>

Keberhasilan implementasi kebijakan juga akan lebih terjamin apabila didukung adanya komitmen yang relatif tinggi dari pihak implementor terhadap tujuan kebijakan dan penataan

akses formal yang disediakan kepada kelompok diluar jajaran lembaga pelaksana. Khususnya kelompok penerima manfaat kebijakan, maupun pihak lain yang berkepentingan terhadap kebijakan tersebut. Edward III menjelaskan bahwa para aktor pelaksana kebijakan tidak hanya dituntut untuk terus meningkatkan pengetahuan atau skil individualnya, namun harus terus menumbuhkan rasa kepedulian yang tinggi untuk merespon setiap layanan publik yang berdampak langsung pada kepentingan masyarakat.<sup>12</sup>

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil temuan peneltiian dan pembahasan yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka sebagai kesimpulan dari penelitian ini adalah : Implementasi program bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Tuladenggi Kacamatan Telaga Biru secara umum telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang ada. Kajian terhadap indkator penting dari teori implementasi kebijaakan sebagaimana yang telah menjadi konsep ukuran pelaksanaan kebijakan Edward III yang terdiri dari sosialisasi atau bentuk pemahaman terhadap kebijakan yang dilaksanakan, ketersediaan anggaran, serta komitmen aktor pelaksana program. Implementasi program bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Tuladenggi telah disosialisasikan oleh pemerintah Desa melalui berbagai kegiatan yang mengumpulkan masyarakat, maupun pelibatan unsur aparat pemerintah pada tingkat Dusun.

Pelibatan unsur pemerintah secara keseluruhan adalah langkah tepat untuk mendukung distribusi informasi kepada masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan. Program bantuan langsung tunai (BLT) model pendanaannya adalah melalui kebijakan anggaran dana Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa dengan melibatkan masyarakat didalamnya. Untuk mendukung tercapainya tujuan program, maka komitmen kerja pemerintah Desa telah ditunjukkan dengan adanya sinergitas dan konsistensi sejak tahapan pengusulan pendataan sampai pada tahapan memastikan adanya dana bantuan masuk dan diterima langsung oleh masyarakat. Ditemukan juga dalam hasil penelitian adanya keluhan masyarakat terhadap pendataan dan penetapan terhadap penerima program bantuan langsung tunai (BLT). Hal ini menunjukan bahwa tingkat penyebaran informasi terkait dengan program tersebut harus lebih dimaksimalkan oleh pemerintah Desa, sehingga tidak menimbulkan kesalahan pahaman dan juga konflik antar pemerintah dengan masyarakat, maupun antara masyarakat itu sendiri.

Sebagai bagian dari komitemen terhadap kontribusi peneliti dalam penelitian ini yang diorientasikan pada lokus peneltian, maka beberapa hal yang menjadi saran dan masukan peneliti. Yaitu : Perlu dimaksimalkan lagi dengan berbagai cara untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan program atau kebijakaan yang diambil dan dilaksanakan, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam mendukung dan menyebarkan informasi penting akan setiap kebijakan yang diambil, perlu adanya evaluasi berjenjang dan terus menerus dilakukan terkait dengan pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT) yang akan menjadi dasar perbaikan terhadap program tersebut kedepannya, koordinasi terus menerus dengan pemerintah daerah perlu dilakukan untuk membangun sinergitas terhadap pencapain tujuan kebijakan program bantuan langsung tunai (BLT), khususnya berkaitan dengan kelancaran dari penerimaan dana kepada masyarakat penerima, terus meningkatkan komitemen kerja yang dapat mendorong tercapainya semua kebijakan pembangunan di Desa Tualdenggi.

## **REFERENSI**

- Abdul, Solichin. 2005. Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bumi Aksara.
- Almutahar, H. Isdairi (2016). Implementasi Program Simpanan Keluarga Sejahtera Pada Masyarakat Desa Jangkeng Dua Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2016*.

- Agustino, Leo 2008. Dasar-dasar kebijakan publik. Alfabeta. Bandung.
- Arifin, Tahir. 2014, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Daerah, Bandung, ALFABETA.
- Hasanah, Putri (2021). Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Sebagai Upaya Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Di Desa Prajekan Lor Kabupaten Bondowoso. *CERMIN : Jurnal Penelitian*, Volume 5, No. 2 Tahun 2021, hal. 2019-2029.
- Hezel dan Tangkilisan, 2003, Kebijakan Publik Yang Membumi, Lukman Offset, Yogyakarta
- Islamy, Irfan. 2007. Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara. Bumi aksara. Jakarta.
- Marta, F.D.Y, Nurlitasari, R. (2021). Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Era Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sigi 2020. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau* Vol. 1, No. 1, Edisi Januari – Juni 2021.
- Nugroho, Riant. 2011. Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sasuwuk, C.H. Lengkong, F.D, Palar. N.A. (2021). Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa. *JAP* No. 108 Vol. VII 2021.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kualitatif, Kauntitatif, dan R&D. Alfabeta, Bandung.
- Udayan, I.M.A, Sukraaliawan, I.N (2021). Implementasi Kebijakan BLT-Dana Desa Kepada Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 Di Desa Ambengan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, Vol 13 No. 2 – Agustus 2021.
- Yama, W.O, Rusli, M (2021). Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dimasa Pandemi Covid 19. *Jurnal Masyarakat Pesisir*, volume 3, 1 April 2021, hal. 122-127
- Widodo, J. (2010). Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing. Dokumen Lainnya.
- Winarno, Budi. 2012. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Pressindo. Yogyakarta